

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Umar Sako¹ dan Felmi D. Lantowa²

*Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
 Email: USBaderan@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu menjelaskan dalam bentuk table maupun grafik atas kondisi obyek maupun hasil penelitian dengan bantuan Analisis data regresi sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kuesioner terhadap 40 pegawai/responden yang diambil secara sampel acak. Dalam konteks ini penelitian diharapkan dapat member informasi atau pengetahuan tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo, serta menjadi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai standar akuntansi pemerintahan bagi kualitas penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Hasil analisis determinasi menunjukkan variabel dependen (kualitas laporan keuangan) mampu dijelaskan oleh variabel independen (penerapan SAP).

Kata kunci: *Standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan*

Abstract

This research analyzes and examines the effect of government accounting standards implementation on the quality of financial statements presentation in Gorontalo Regency Government. This research was conducted at Gorontalo Regency Government. Descriptive quantitative approach is applied i.e. it explains in the form of tables and graphs on the condition of objects and research results with the help of simple regression data analysis. Data was obtained through documentation and questionnaire on 40 employees / respondents by random sampling. The objective is providing information or knowledge about the effect of government accounting standards application of on the quality of financial statements presentation in Gorontalo Regency Government, as well as becoming an input and reference to take decisions regarding government accounting standards for the quality of presentation of financial statements. The results showed that the application of SAP has a positive effect on the quality of presentation of financial statements at the Office of Revenue Regional Finance and Assets Management (DPPKAD) in Gorontalo regency. The result of determination analysis shows that the dependent variable (quality of financial report) can be explained by independent variable (SAP implementation).

Keywords: *Government Accounting Standards and Quality of Financial Statements*

Pendahuluan

Pencapaian kinerja sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui komunikasi dengan rakyat dengan menggunakan komunikasi dua arah hal ini dilakukan sebagai upaya mencari solusi pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Menurut Apriyono (2010) mengungkapkan bahwa “Pemerintahan yang baik itu bersifat responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas untuk mewujudkan hal tersebut dengan cara menerapkan *good governance*”.

Good governance atau pemerintahan yang baik dinilai dengan pemerintahan yang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sehingga pemerintah dalam mewujudkan *good governance* tersebut dalam melaksanakan otonomi daerah, memerlukan suatu aturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan negara. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Menurut Renyowijoyo (2008: 171) menyatakan bahwa:

”Perubahan pada bidang keuangan negara ini telah menimbulkan reformasi disegala bidang sebagai bentuk dukungan agar perubahan tersebut dapat terlaksana dengan baik”. Reformasi keuangan ini juga didalamnya mengatur mengenai akuntansi pemerintahan karena untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya melalui proses akuntansi tersebut. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas perlu adanya standard akuntansi pemerintah.”

Sedangkan Yujana (1998), mengungkapkan bahwa “Adanya perubahan akuntansi pemerintahan yang awalnya pembukuan akuntansi pemerintah menggunakan cara akuntansi tradisional berbasis kas dengan pencatatan single entry menuju akuntansi modern”. Akuntansi basis kas memiliki keuntungan yakni pencatatannya yang sederhana. Akan tetapi akuntansi berbasis kas ini juga memiliki beberapa kekurangan yakni, akuntansi berbasis kas kurang informatif karena informasi yang dihasilkan

mengenai saldo kas, penerimaan, pengeluaran dan informasi yang diberikan mengenai harta, hutang dan kewajiban yang dimiliki oleh organisasi. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan reformasi di dalam penerapan akuntansi pemerintahan hal ini diperlukan agar keuangan pemerintah dapat memberikan laporan keuangan yang bersifat informatif. Salah satu cara yakni dengan mewajibkan pencatatan keuangan pada setiap instansi pemerintahan berbasis akrual, baik pemerintah pusat maupun daerah.

“Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diatur pada Pasal 36 ayat 1 yakni pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun, Sehingga pada tahun 2010 tepatnya pada bulan Oktober pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual” (Abdullah, 2010).

Standar ini diperlukan dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Namun laporan keuangan yang dihasilkan belum diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya instansi pemerintah yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa temuan oleh audit, baik audit intern maupun audit ekstern. Salah satu Kabupaten yang ada di lingkungan Provinsi Gorontalo yang laporan keuangannya masih terdapat beberapa koreksi terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo sendiri merupakan Kabupaten tertua atau yang pertama kalinya yang ada pada Provinsi Gorontalo. Untuk pengelolaan keuangannya pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, hal ini berdasarkan wawancara dengan kepala dinas keuangan dan asset daerah serta laporan keuangan pemerintah yang disusun pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Penerapan SAP Nomor 71 ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo sehingganya tujuan dari laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan, untuk itu maka laporan maka laporan keuangan wajib disusun berdasarkan SAP yang telah ditetapkan. Untuk melihat kesesuaian laporan keuangan dengan standar maka dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut, maka dari itu laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo dilakukan audit pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah untuk mengukur akuntabilitas dan

transparansi dari laporan keuangan, selama 3 Tahun Anggaran terakhir yakni tahun anggaran 2013, 2014 dan terakhir 2015 memperoleh opini dari pihak BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun masih ada beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan pertaturan perundang-undangan yang berlaku yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Piutang daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.560.796.500,00 tidak tertagih dan belum dihapuskan
2. Investasi dan kemitraan dengan pihak ke tiga pada PT. Agro Potongbulu yang tidak beroperasi belum dilakukan upaya likuidasi dan belum dilakukan penarikan atas harta tersebut.
3. Pemotongan biaya-biaya KDN dan KJP TPA sampah Talumelito sebesar Rp.233.579.403, dari penerimaan dana bagi hasil dengan provinsi tidak sesuai ketentuan.
4. Realisasi belanja pengadaan tanah pada BLUD RSUD MM Dunda belum dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 21.291.500.

Berdasarkan hasil audit ini masih terdapat beberapa item yang menjadi temuan karena sistem pencatatan yang belum sesuai dengan SAP PP Nomor 71, seperti piutang daerah yang tidak tertagih tapi belum dihapuskan dan investasi kemitraan dengan pihak ketiga belum dilakukan likuidasi hal ini menggambarkan pencatatan terhadap laporan keuangan yang belum tertata dengan baik. Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang dijelaskan ini, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2011: 7) menyatakan bahwa "Metode penelitian kuantitatif berdasarkan pada filsafat positivisme dalam metode penelitiannya, hal ini digunakan pada penelitian populasi atau sampel tertentu".

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan deskriptif. Metode deskriptif adalah dengan melakukan

deskripsi/penjelasan dalam bentuk tabel maupun grafik atas kondisi obyek penelitian maupun hasil penelitian. Metode kuantitatif adalah dengan menggunakan alat analisis kuantitatif dan dalam penelitian ini akan menggunakan regresi sederhana.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang dipilih oleh peneliti yakni aparatur pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Kriteria sebagai berikut:

- 1) Merupakan staf/pegawai DPPKAD yang bertanggung jawab langsung atas penyusunan laporan keuangan dan pertanggung jawaban laporan keuangan di tingkat Kabupaten Gorontalo
- 2) Staf/pegawai DPPKAD Kabupaten Gorontalo yang memahami laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 95 pegawai/responden yang memahami atau memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* (Sugiyono, 2011: 330). Populasi yang terpilih menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 40 pegawai/responden dari jumlah seluruh populasi sebanyak 95 pegawai/responden. Dengan rincian sampel dapat dilihat pada tabel satu berikut:

Tabel 1.
Sampel Penelitian

No	Sub Bagian	Jumlah Pegawai
1	Bidang Akuntansi	20
2	Bidang sekretariat	4
3	Bidang Pendapatan & Pembangunan Daerah	4
4	Bidang Anggaran	4
5	Bidang Perbendaharaan	4
6	Bidang Aset	4
TOTAL		40

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, 2016

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut yaitu:

- 1) Observasi, yakni mengamati dan meneliti secara langsung terhadap variable yang menjadi sasaran penelitian.
- 2) Kuesioner, yakni mengedarkan daftar pertanyaan terhadap responden yang telah ditentukan.
- 3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen data dan informasi di Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan BPK RI Provinsi Gorontalo.

Data yang dikumpulkan melalui observasi, kuesioner dan dokumentasi dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, meliputi data Kuantitatif, yaitu data terungkap dan berbentuk angka-angka hasil olahan dalam penelitian. Dan data Kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif yang diharapkan dapat menjelaskan masalah yang akan diteliti.

Pengukuran Variabel

Dalam memudahkan melaksanakan dan menganalisis hasil penelitian maka dibuat operasional variabel. Sugiyono (2011: 31) "Variabel adalah merupakan suatu hal dalam bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi tersebut lalu ditarik sebuah kesimpulan". Adapun variabel yang ada dalam penelitian terdiri atas dua jenis yakni variabel bebas dan variabel terikat:

- 1) Variabel bebas adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dengan indikator seluruh standar. Menurut Mardiasmo (2009:148) "Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan acuan atau pedoman yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan".
- 2) Variabel tak bebas atau variabel terikat (Y) adalah kualitas penyajian laporan keuangan dengan indikator laporan keuangan tersebut relevan, andal, bisa dibandingkan dan bisa dipahami. "Menilai sebuah kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi".(Tanjung, 2008: 10).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini perolehan data mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap penyajian laporan keuangan, dibuat pernyataan-pernyataan dengan menggunakan skala *likert*. Sudjana (2000:113) menyatakan bahwa "Untuk menentukan nilai atau skor dari setiap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner

menggunakan skala *likert*". Untuk menghitung nilai dari pada variabel X (standar akuntansi pemerintahan) dan variabel Y (kualitas penyajian laporan keuangan) melalui cara mencari rata-rata (*mean*) variabel X (standar akuntansi pemerintahan). Rumus rata-rata *mean* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$a. \bar{x} = \frac{\sum x_1}{n}$$

$$b. \bar{y} = \frac{\sum y_1}{n}$$

Keterangan:

\bar{x} = Nilai rata-rata variabel x

\bar{y} = nilai rata-rata variabel y

Σ = *Sigma* (jumlah)

n = Jumlah kelas

$x_1 - y_1$ = Nilai dari i sampai dengan ke-n

Sumber: Sudjana (2000: 113)

Pemberian bobot dari jawaban yang didapatkan untuk setiap item pernyataan dalam skala *likert* sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.
Pemberian Skor Jawaban

Kode	Pilihan Jawaban	Skor / Poin Penilaian
SD	Seluruhnya diterapkan	5
SBD	Sebagian besar diterapkan	4
KKD	Kadang-kadang diterapkan	3
SKD	Sebagian kecil diterapkan	2
TPD	Tidak pernah diterapkan	1

Sumber: Sudjana (2000, 113)

Hipotesis

Sugiyono (2011: 135) menyatakan "Untuk pengujian hipotesis tentang ada atau tidaknya pengaruh positif antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (variabel X) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan (variabel Y), digunakan hipotesis statistik" adalah sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$, Tidak berpengaruh positif antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

$H_a : \rho \neq 0$, Berpengaruh Positif antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah.

Untuk menguji hipotesis di atas dilakukan pengujian dengan cara sebagai berikut:

$$F = \frac{JK \text{ Regresi} / k}{JK \text{ Residu} / n - k - 1}$$

Sumber : Sugiyono (2011: 135),

Kriteria pengujian:

Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{\{\alpha; (k, n-k-1)\}}$ atau $\rho\text{-value} \leq \alpha$. Terima H_0 dalam hal lain. Dan untuk menganalisis kuat lemahnya pengaruh antara variabel dapat di klasifikasikan sebagaimana pada tabel 3 berikut:

Tabel 3.
Tingkat Keeratan Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Kekuatan Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, (2011: 135)

Setelah menghitung uji statistik akan menghasilkan nilai koefisien yang bisa dibandingkan dengan tabel tiga tentang tingkat keeratan koefisien korelasi, setelah itu bisa diketahui pengaruhnya. “Hasil perhitungan uji statistik memiliki nilai positif, dengan kata lain H_0 ditolak, yang artinya menolak dugaan yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh positif atau negatif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan”. (Sugiyono, 2011: 135).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, sehingga instrumen ini harus diuji validitas (keabsahan) dan realibilitas (kehandalan). Untuk itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas sehingga data sudah siap untuk diolah. Uji validitas dan uji reliabilitas ini dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian. Para responden penelitian bukan merupakan responden yang berasal dari DPPKAD Kabupaten Gorontalo, tapi responden yang berasal dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo program studi akuntansi. Jumlah responden untuk uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 orang mahasiswa jurusan akuntansi. Berikut adalah hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk variabel penerapan SAP (X), variabel kualitas laporan keuangan (Y):

Uji Validitas

Uji validitas ini perlu dilakukan dengan cara antara skor masing-masing butir pertanyaan dikorelasikan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua skor pertanyaan, alat ukur yang digunakan mempunyai validitas bila korelasi tersebut signifikan, sehingga bisa diartikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat untuk mengukur yang hendak diukur. (Ghozali, 2005)

Dengan taraf signifikan 5% dan jumlah responden sebanyak 32 orang, maka angka kritis dari r_{tabel} (tabel *r product moment*) yang didapat adalah sebesar 0,304 jika koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} maka pertanyaan tersebut valid.

Berdasarkan pengujian validitas yang telah dilakukan ternyata pertanyaan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dengan nilai terendah sebesar 0.337 yakni item pertanyaan nomor 13 yakni Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan sesuai dengan PSAP, dan item yang memiliki nilai teratas sebesar 0,583 yakni item pertanyaan nomor 18 yakni Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai konsep.

Hasil perhitungan nilai korelasi antara item total variable X menunjukkan untuk seluruh butir pernyataan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari pada nilai r_{tabel} yaitu 0.304. Hal ini mengindikasikan semua pernyataan variabel X valid dan dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

Hasil uji validitas variabel Y (Kualitas laporan keuangan) menunjukkan pertanyaan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dengan nilai terendah sebesar 0.457 yakni item pertanyaan nomor 7 yakni Laporan keuangan pada setiap entitas pelaporan selalu dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan item yang memiliki nilai teratas sebesar 0.758 yakni item pertanyaan nomor 8 yakni Laporan keuangan disusun oleh pegawai keuangan yang memiliki pengetahuan yang memadai.

Hasil perhitungan nilai korelasi antara item total variable Y menunjukkan untuk seluruh butir pernyataan diperoleh nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai r_{tabel} yaitu 0.304. Nilai ini mengindikasikan semua pernyataan variabel Y valid dan dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian terhadap item pertanyaan. Reliabilitas menunjukkan adanya konsistensi pada alat ukur dalam mengukur gejala yang sama.

Pengujian realibilitas pada penelitian ini hanya dilakukan terhadap 32 responden. "Pengambilan keputusan berdasarkan nilai *alpha*, jika nilai *alpha* sama dengan atau melebihi 0,60 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel begitupun sebaliknya apabila nilai *alpha* kurang dari 0.60 pertanyaan variabel tersebut tidak reliable" (Ghozali ,2005). Hasil dari pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
Penerapan SAP (X)	0.7678	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.7067	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan, kualitas laporan keuangan dikatakan reliabel karena nilai *alpha cronbach* yang dihasilkan dari variabel tersebut lebih besar dari 0,6. Hal ini dapat dikatakan seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan Program SPSS versi 16. Setelah instrumen dilakukan pengujian maka instrumen tersebut sudah dapat disebarkan ke Responden dalam hal ini pegawai DPPKAD Kabupaten Gorontalo sebanyak 40 orang pegawai. Dari hasil olah data kuisiionare tersebut dapat dilihat hasil pengujian penelitian tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan melalui analisis regresi. Dari model tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ini terlihat dari koefisien regresi yang positif. Setiap kenaikan variabel penerapan SAP sebesar satu satuan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diperoleh koefisien determinasi $KD = r^2 \times 100\%$ adalah sebesar 0,804. Artinya sebesar 80.4% perubahan kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan SAP sedangkan sisanya sebesar 19.6% dipengaruhi oleh variabel lain seperti pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan, latar belakang pendidikan dan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan.

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, artinya penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Gorontalo. Hasil ini sejalan dengan penelitian Irwana (2010) yaitu "Efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan". Hal ini menunjukkan bahwa, penerapan standar akuntansi pemerintahan yang efektif, akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pada PP No 71 Tahun 2010 Mengatur hubungan standard akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan, yang menyatakan bahwa:

"Seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintahan dapat memberikan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut dalam mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan Negara".

"Syarat utama dalam pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami". (Nugraheni, 2008). "Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan maka penyusunan laporan keuangan berpedoman pada SAP sehingga meningkatkan kredibilitasnya sehingga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah" (Hartina, 2009)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni: Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi sederhana bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Ini terlihat dari koefisien regresi yang positif. Setiap kenaikan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar satu satuan maka akan memberikan pengaruh sebesar 0,301 dalam peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Hasil analisis koefisien determinasi diperoleh bahwa sebesar 80,4% perubahan kualitas penyajian laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan SAP sedangkan sisanya sebesar 19.6% dapat dijelaskan

oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pemahaman aparatur dan pengendalian intern.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukri. 2010. Telaah Reformasi Akuntansi Pemerintahan (Menuju Basis Akrua) Dalam Mewujudkan *Good Governance*. Jurnal Lika Liku Kuliah.
- Apriyono, Andri. 2010. Arti Penting Laporan Keuangan. Jurnal Ilmu Manajemen.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketiga.. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hartina, Silka. 2009. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Skripsi USU Repository.
- Irwana, Toni. 2010. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Pariangan Jawa Barat). Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2005. Jakarta. Departemen Keuangan
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2010. Jakarta. Departemen Keuangan
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi Offset.
- Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13. April 2008.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik Non Laba. Jakarta. Mitra Wacana.
- Sudjana. 2000, Statistika untuk Ekonomi dan Niaga. Bandung. Tarsito.
- Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Edisi-Revisi, Cetakan 12. Bandung. Penerbit CV. Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep dan Aplikasi. Cetakan kedua. Bandung. Alfabeta
- Yujana, Lalu Hendry. 1998. Akuntansi Pemerintahan. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.